

## ABSTRAK

Tesis ini disusun atas dasar pemikiran penulis terhadap proses penyimpanan Protokol Notaris yang masih dilakukan secara konvensional. Undang-undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris membuat dan menyimpan akta autentik dan kumpulan dokumen sebagai bagian dari Protokol Notaris. Namun metode dan proses penyimpanan yang ada berpotensi mengakibatkan kerusakan atau kehilangan bila dihadapkan pada kondisi *Force Majeure*. Pada saat yang sama, para pihak serta Notaris belum memiliki payung legalitas terkait Protokol Notaris yang dibuat secara elektronik.

Dari keadaan faktual tersebut maka penulis menetapkan dua rumusan masalah. Pertama kedudukan hukum atas kumpulan dokumen dalam Protokol Notaris yang dibuat secara elektronik. Rumusan masalah berikutnya adalah perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pembuatan Protokol Notaris secara elektronik.

Piranti yang penulis gunakan sebagai metode penelitian untuk mengupas rumusan masalah hingga sampai pada satu simpulan adalah metode penelitian hukum doktrinal dan penelitian yang berorientasi pada reformasi hukum. Dengan kedua metode ini, penyusunan tesis dibasi oleh eksistensi bahan pustaka berupa statuta dan bahan sekunder lain sebagai titik awal lahirnya peraturan yang bias mengakomodir tuntutan perkembangan teknologi masa depan. Adapun pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif.

Hasil dari upaya penelitian yang penulis lakukan menjadi padatan yang kristalisasi terbentuk pada dua simpulan. Pertama, bahwa kedudukan hukum dari kumpulan dokumen sebagai bagian dari Protokol Notaris yang dibuat dan disimpan secara elektronik belum memiliki kekuatan hukum. Keberadaannya hanya bersifat sebagai data pendukung dan arsip yang berfungsi sebagai alat bantu bagi Notaris dalam menyelesaikan pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Kedua, bahwa perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pembuatan Protokol Notaris secara elektronik dijamin oleh peraturan perundang-undangan dengan satu prasyarat bahwa dokumen tersebut hanya bersifat sebagai komplementer dari Protokol Notaris yang dibuat dan disimpan secara konvensional. Meski demikian, terdapat ancaman sanksi bagi siapa pun yang melanggar aturan mengenai kerahasiaan dan jaminan keamanan para pihak yang berkepentingan dalam pembuatan dan penyimpanan kumpulan dokumen secara elektronik.

*Kata Kunci: Protokol Notaris, kedudukan hukum, kumpulan dokumen elektronik*

## ABSTRACT

This thesis is written based on the process of storing a Notary Protocol which is still conventional. UUJN requires that a Notary Public make and store an authentic deed and a collection of documents as part of the Notary Protocol. However, existing storage methods and processes must be improved because it can be damage due to Force Majeure. At the other hand, the parties as well as the Notary Public have not had legal protection related to the Notary Protocol which was made electronically.

From the factual circumstances, the writer sets two problem statements. Firstly, the legal position of a documents in an electronic notary protocol. The next problem formulation is legal protection for the parties in making the Notary Protocol electronically..

The tool that the author uses as a research method to explore the formulation of the problem to arrive at one conclusion is the method of doctrinal law research and research that is oriented to legal reform. With these two methods, the preparation of a thesis is limited by the existence of library materials in the form of statutes and other secondary materials as a starting point for the birth of regulations that can accommodate the demands of future technological developments. The descriptive statute approach is used in this thesis.

The results of the research become a solid crystallization at two conclusions. First, that the legal position of documents as part of the Notary Protocol that is made and stored electronically does not yet have the legal protection. Its existence is only as supporting data and archives that serve as a tool for Notaries to complete the implementation of their duties and obligations. Second, the legal protection of the parties in making the Notary Protocol electronically is guaranteed by statutory regulations with one precondition that the document is only as a complementary to the Notary Protocol that was made and kept conventionally. Nevertheless, there is a threat of sanctions for anyone who violates the rules regarding confidentiality and security guarantees of interested parties in the creation and storage of documents electronically.

*Keywords: Notary Protocol, legal status, collection of electronic documents*